

## PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2011-2014

*FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT IN SOUTH DISTRICT GOVERNMENT MINAHASA  
YEAR 2011-2014*

Oleh:

**Jelin Rempowatu<sup>1</sup>**  
**Victorina Tirayoh<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: <sup>1</sup>[rempowatu.jelin@yahoo.com](mailto:rempowatu.jelin@yahoo.com)  
<sup>2</sup>[victorinatirayoh@gmail.com](mailto:victorinatirayoh@gmail.com)

**Abstrak:** Kinerja keuangan menunjukkan kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan Negara dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu perlu diukur kinerja pemerintah, sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode diskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan, rasio kemandirian keuangan daerah dinilai baik karena setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah meningkat, rasio efektifitas pada tahun 2011 dikatakan kurang efektif, karena kinerja keuangan masih dibawah 60%-80%, dan pada tahun 2012-2014 kinerja keuangan dikatakan sangat efektif, karena kinerja keuangan di atas 100 %, begitu juga dengan rasio efisiensi pada tahun 2011 dikatakan cukup efisien, karena kinerja keuangan masih diatas 80%-90%, dan pada tahun 2012-2014 kinerja keuangan di katakan sudah sangat efisien, karena kinerja keuangan dibawah 60%.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan, sektor publik, rasio keuangan

**Abstract:** The financial performance demonstrate financial conditions and the government's ability to obtain and use the funds for the construction of the State and generate better public services. It is necessary to measure the performance of the government, the extent of progress made by the government in carrying out its duties. The purpose of this study to determine the financial performance of the Government of South Minahasa regency. This research was conducted in the Office of Financial Management, Revenue and Assets, and the data used is quantitative data in the form of the Budget Realization Report (LRA). The method used is descriptive quantitative method to measure financial performance with financial ratios. Results showed that the ratio of local financial independence is considered good because every year regional revenue increase, effectiveness ratio in 2011 is said to be less effective, due to the financial performance is still below 60% - 80%, and in the year 2012 to 2014 financial performance is said to be very effective, financial performance over 100%, as well as the efficiency ratio in 2011 is said to be quite efficient, as the financial performance is still above the 80% - 90%, and in the year 2012 to 2014 financial performance at say is already very efficient, since the financial performance below 60 %.

**Keywords:** financial performance, public sector, financial ratios

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan mampu mengembangkan kebesarannya atau sehubungan berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah penganggaran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Dalam PSAP No.4, keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan juga harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan sistem imbalan atau sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan atau organisasi dalam rangka menciptakan *good governance*. Hal ini menekankan pada peranan manager publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan pengelolaan manajerial yang bersih dari korupsi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik menilai pencapaian suatu strategi.

Selama ini, pemerintah dinilai sebagai organisasi birokratis yang tidak efisien, lambat, dan tidak efektif. Hal itu memang sudah menjadi persepsi masyarakat. Padahal, dalam menjalankan manajemen modern, unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan. Penerapan sistem akuntansi diharapkan mampu membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah harus sejalan dengan konsep sistem akuntansi pemerintahan dalam SAP.

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Artinya, kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu perlu diukur kinerja pemerintah, sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Mahmudi (2010;142) menjelaskan, analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang menghubungkan atau memperbandingkan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, serta mengidentifikasi hubungan antara keduanya, misalnya dengan menghubungkan jumlah pada suatu pos tertentu dengan jumlah pada pos lainnya dalam rencana, akan diperoleh perbandingan (rasio) yang dapat menggambarkan baik atau buruknya posisi keuangan perusahaan yang bangkrut.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pemerintahan

Mursyidi, (2009;1), menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial (Deddi dkk; 2010:4).

## **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Pramono, Restianto, dan Bawono (2010:112).

## **Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah Mahmudi (2010:19). Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

## **Kinerja**

Kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif (Sinambela, 2012:186). Dessler (2013: 182) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah menilai hasil kerja suatu organisasi publik.

## **Tujuan Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja menurut Sinambela (2012: 187) mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

## **Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mohammand (2009:31) meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan (*input*); segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*); ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*); sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*); segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*); sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*); pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

## **Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

## **Peran Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## Analisis Rasio Keuangan

### 1. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal (Mahmudi, 2010:142).

### 2. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahmudi, 2010:143).

### 3. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2010:146).

## Struktur APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah; meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.  
Pendapatan daerah dikelompokkan atas:
  1. Pendapatan Asli daerah (Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah).
  2. Dana Perimbangan (Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus).
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah).
- b. Belanja daerah; meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.  
Belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga)
  2. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).
- c. Pembiayaan daerah; meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari:
1. Penerimaan pembiayaan
  2. Pengeluaran pembiayaan.

### **Penelitian Terdahulu**

Santoso (2014) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (Dppka) Kabupaten Kepulauan Sangihe, tujuannya untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui kinerja DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengelola keuangannya dikatakan kurang baik. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yaitu penelitian deskriptif. Perbedaannya pada objek penelitian. Fidelius (2013) dengan judul Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado, tujuannya untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui kinerja Pengelolaan keuangan daerah kota manado cukup baik berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yaitu penelitian deskriptif. Perbedaannya pada objek penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif, Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2016.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mencari literatur –literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran. Dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data dapat menggunakan: sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama dan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Sangadji dan Sophia, 2010:190). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan, dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011-2014.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1. *Field Research* (Penelitian lapangan), yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan melakukan:
  - a. Wawancara, dengan bertanya secara langsung pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan.
  - b. Dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014**

	2011	2012	2013	2014
Total				
Pendapatan Daerah	515.891.352.257	537.329.647.572	604.614.969.408	684.371.721.501
Realisasi PAD	9.407.280.004	10.620.087.945	14.406.092.809	26.137.234.620
Target PAD	11.843.237.500	8.499.800.000	13.435.194.704	22.457.922.250
Realisasi Pengeluaran	483.807.278.567	525.891.166.484	561.242.693.084	689.167.009.246
Bantuan Pusat dan Pinjaman	506.484.072.253	526.709.559.627	518.402.298.599	654.665.686.881

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan, 2014

Hasil penelitian diketahui bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.515.891.352.257, kemudian tahun 2012 meningkat sebesar Rp.537.329.647.572, pada tahun 2013 kembali meningkat sebesar Rp.684.371.721.501, dan pada tahun 2014 meningkat kembali sebesar Rp.684.371.721.501. Realisasi PAD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sebesar Rp.9.407.280.004, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.10.620.087.945, Pada tahun 2013 meningkat lagi sebesar Rp.14.406.092.809, dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebesar Rp.26.137.234.620. Target PAD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sebesar Rp. 11.843.237.500, kemudian pada tahun 2012 berkurang sebesar Rp. 8.499.800.000, Pada tahun 2013 meningkat lagi sebesar Rp. 13.435.194.704, dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebesar Rp. 22.457.922.250. Realisasi Pengeluaran Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sebesar Rp.483.807.278.567, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.525.891.166.484, Pada tahun 2013 pengeluaran berkurang menjadi Rp.561.242.693.084, dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebesar Rp.689.167.009.246. Bantuan Pusat dan Pinjaman Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sebesar Rp.506.484.072.253, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.526.709.559.627, Pada tahun 2013 pengeluaran berkurang menjadi Rp.518.402.298.599, dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebesar Rp.654.665.686.881.

**Tabel 2. Rasio Kemandirian**

Rasio Keuangan	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)
Rasio Kemandirian	0,018 %	0,020	0,027	0,039

Sumber: Data Olahan 2016

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis perbandingan rasio kemandirian, dapat diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2011-2014 sudah dapat dikatakan baik, karena dilihat dari tingkat Pendapatan Asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Tabel 3. Rasio Efektivitas**

Rasio Keuangan	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)
Rasio Efektivitas	0,794	1,249	1,072	1,163

*Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan, 2014.*

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis perbandingan rasio efektifitas keuangan daerah dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2011-2014 rata-rata 90% - 100 %. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan efektif.

**Table 4. Rasio Efisiensi**

Rasio Keuangan	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)
Rasio Efisiensi	89,69	49,51	38,95	26,36

*Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan, 2014.*

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis perbandingan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2011-2014 rata-rata di bawah 60 %. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan sangat efisien.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan rasio kemandirian, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2011-2014 dinilai baik, karena setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan.
2. Berdasarkan rasio efektifitas pada tahun 2011 kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan masih kurang efektif, dan tahun 2012-2014 kinerja keuangannya sudah sangat efektif.
3. Berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2011 kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan masih cukup efisien, dan tahun 2012-2014 kinerja keuangannya sudah sangat efisien.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan dapat mengembangkan sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi keuangann daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik.
2. Penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian tentang kinerja keuangan di instansi pemerintahan yang lain untuk kemudian dapat dibandingkan sehingga menjadi masukan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Deddi, Nordiawan, Ayuningtyas, Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Dessler, Gray. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indeks
- Sangadji Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi. Malang.
- Fidelius, Fidel. 2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol. 1, No 4.  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3418/2961>
- Kuncoro, M. (2009), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Edisi 3, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta .
- Mohammad Mahsun, 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama, BPF. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Pramono Hariadi, Tanuar E. Restianto dan Icut R. Bawono, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, Oldison, 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol. 2, No 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5904/5436>
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.